

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai kesimpulan dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemerintah kabupaten Belu sudah berperan dalam menangani Eks Pengungsi Timor Leste atau yang sekarang disebut Warga Baru Kelahiran Timor-Timur dalam rangka melaksanakan Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Tugas Pembantuan diberikan karena tidak semua tugas dari Pemerintah Pusat dapat diselesaikan melalui asas Desentralisasi dan asas Dekonsentrasi. Melalui asas Tugas Pemabntuan ini Pemerintah Kabupaten Belu telah menyediakan sejumlah fasilitas untuk para warga baru ini seperti tempat tinggal, makan dan minum dan lain-lain. Dari aspek keimigrasian, Dinas Keimigrasian Kabupaten Belu sudah melaksanakan tugasnya dengan baik yaitu menjaga pintu masuk di wilayah perbatasan baik itu di Motaain atau Metemau.
2. Masih ada beberapa kendala yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Belu dalam menangani para warga baru ini dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan seperti kebutuhan akan listrik dan air bersih. Bukannya Pemerintah Kabupaten Belu tidak mau memenuhinya tetapi karena tempat tinggal mereka yang sangat jauh dari perkotaan dan jalan yang dilalui itu belum diperbaiki, masih jalan pengerasan sehingga

membuat Pemerintah menjadi sulit memenuhi kebutuhan tersebut. Belum lagi permintaan dari para warga baru ini yang bersifat terus-menerus padahal Pemerintah Kabupaten Belu sendiri juga perlu memperhatikan masyarakat Belu lainnya.

Dalam aspek keimigrasian kendala yang dihadapi adalah adanya para pelintas gelap atau orang-orang dari negara Timor Leste yang masuk ke wilayah Indonesia melalui jalan-jalan rahasia/ tikus dan tidak memiliki surat perjalanan yang resmi seperti paspor dan visa. Dalam permasalahan ini menunjukkan bahwa penanganan masalah perbatasan belum dilakukan secara optimal sehingga ada beberapa pihak yang mengambil keuntungan dari para pelintas gelap ini.

3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah kabupaten Belu dalam menghadapi kendala-kendala yang ada adalah dengan selalu menyediakan dukungan pikiran dan dukungan tenaga sehingga dapat melakukan kegiatan pemberdayaan dengan menyediakan fasilitas-fasilitas yang belum ada seperti memperbaiki jalan utama untuk masuk ke tempat tinggal para warga baru ini, menyediakan lahan garapan yang subur, listrik dan air minum.

Dari segi keimigrasian para pelintas gelap ini harus ditindak tegas dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya yang menyebabkan banyaknya orang asing yang secara bebas masuk ke wilayah Kabupaten Belu. Menghilangkan persepsi yang menyatakan bahwa masalah perbatasan adalah kewenangan Pusat padahal dalam Undang-Undang No32 Tahun

2004 secara jelas dan kuat menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dan Dinas/ Lembaga Teknis yang terkait harus bisa menangkap peluang strategis yang ada. Sehingga dapat menambah pendapatan daerah khususnya daerah Belu yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste

B. Saran

Dari hasil kesimpulan di atas dapat dikemukakan beberapa saran yaitu:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Belu

Sejauh ini Pemerintah Daerah Kabupaten Belu telah melakukan tugasnya dengan baik. Kirannya hal ini tetap dipertahankan sehingga dapat menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Pemerintah Kabupaten Belu harus selalu menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mengembangkan sumber daya alam yang ada. Memberikan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh para warga Kabupaten Belu baik itu warga lokal maupun warga baru kelahiran timor- timur seperti memperbaiki jalan menuju pemukiman warga baru ini agar sumber daya manusiannya dapat dikembangkan. Pemerintah Kabupaten Belu juga dapat membangun pasar untuk transaksi perekonomian di wilayah perbatasan dan membuka peluang bagi investor baik lokal, nasional maupun asing untuk menanamkan modalnya baik itu untuk jangka waktu panjang maupun pendek sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Bagi Dinas Keimigrasian Kabupaten Belu

Salah satu tugas dari Dinas Keimigrasian adalah menjaga perbatasan sebagai tempat transit. Masalah para pelintas gelap yang memasuki wilayah Indonesia harus ditindak tegas, misalnya memberikan sanksi pidana bagi yang tertangkap basah melintasi perbatasan tanpa dilengkapi dokumen perjalanan yaitu paspor dan visa dan memberikan sanksi juga untuk pihak-pihak yang membuka peluang terjadinya pelintasan gelap. Dinas Keimigrasian juga dapat mengusulkan untuk dibuka lagi pintu masuk di perbatasan yang baru dan ditempatkan petugasnya di sana. Sehingga keamanan nasional dapat terjamin dan masyarakat dapat hidup dengan tentram.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat kirannya dapat menangkap setiap peluang bisnis dari adanya kawasan perbatasan tanpa harus menunggu bantuan dari pemerintah secara terus-menerus. Masyarakat juga diharapkan dapat berinteraksi sosial dengan baik antara warga lokal dan warga baru kelahiran timor-timur agar tidak terjadi konflik internal sehingga terciptanya masyarakat yang adil, makmur dan aman. Masyarakat juga harus menjaga hutan-hutan yang dilindungi sehingga tidak terjadi global warning di daerah yang kita cintai yaitu Kabupaten Belu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hanif Nurcholis, 2005, Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Gransindo, Jakarta
- Hestu Cipto Handoyo, 2009, Hukum Tata Negara Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi, Universtas Atma Jaya, Yogyakarta
- Imam Santoso, 2004, Prespektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional, UI-Press, Jakarta
- Ni' matul Huda, 2009, Hukum Pemerintahan Daerah, Nusa Media, Bandung
- Hukum Tata Negara Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sindhunata, 2003, Jembatan Air mata Tragedi Manusia Timor-Timur, Galang Press, Yogyakarta
- Suharso, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Widya Karya, Semarang
- Sadu Wasistiono *et all*, 2006, Memahami Asas Tugas Pembantuan, Fokusmedia, Bandung
- Sihar Sihombing, 2009, Hukum Imigrasi, Nuasa Aulia, Bandung

Website

[http:// www.Google.com](http://www.Google.com) diakses 2 Oktober 2009

[http:// www.Harian Pelita](http://www.HarianPelita) diakses 2 Oktober 2009

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No.5 Tahun 1974 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.52 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Makalah

Sumyar, Pentingnya Status Kewarganegaraan, Hukum Kewarganegaraan, 2008

Konvensi

Konvensi Jenewa Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi